



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
 23. Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN
2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai Berikut:

A. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.1. Belanja Tidak Langsung angka 1) Belanja Pegawai huruf (d) angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Untuk Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas setiap bulan dengan ketentuan yang meliputi :

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis di RSUD Kasongan diatur sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Pejabat Struktural Eselon III a | 1.000.000 |
| 2 | Pejabat Struktural Eselon III b | 850.000 |
| 3 | Pejabat Struktural Eselon IV a | 700.000 |
| 4 | Pejabat Struktural Eselon IV b | 525.000 |
| 5 | Dokter Umum /Dokter Gigi RSUD : | |
| | - Pejabat Fungsional Golongan IV | 3.500.000 |
| | - Pejabat Fungsional Golongan III | 3.500.000 |
| 6 | Apoteker | 1.500.000 |
| 7 | Pejabat Fungsional Golongan IV | 515.000 |
| 8 | Pejabat Fungsional Golongan III | 450.000 |
| 9 | Pejabat Fungsional Golongan II | 420.000 |
| 10 | Pelaksana Golongan IV | 370.000 |
| 11 | Pelaksana Golongan III | 315.000 |
| 12 | Pelaksana Golongan II | 280.000 |
| 13 | Pelaksana Golongan I | 265.000 |

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis di wilayah Kecamatan Katingan Hilir diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--|----------------------|
| 1 | Dokter Umum/Dokter Gigi : | |
| | - Pejabat Fungsional Golongan IV | 2.500.000 |
| | - Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS | 2.000.000 |
| 2 | Pejabat Fungsional Golongan IV | 515.000 |
| 3 | Pejabat Fungsional Golongan III | 450.000 |
| 4 | Pejabat Fungsional Golongan II | 420.000 |
| 5 | Pelaksana Golongan IV | 370.000 |
| 6 | Pelaksana Golongan III | 315.000 |
| 7 | Pelaksana Golongan II | 280.000 |

- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Tasik Payawan diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--|----------------------|
| 1 | Dokter Umum/Dokter Gigi : | |
| | - Pejabat Fungsional Golongan IV | 2.500.000 |
| | - Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS | 2.000.000 |
| 2 | Pejabat Fungsional Golongan IV | 530.000 |
| 3 | Pejabat Fungsional Golongan III | 470.000 |
| 4 | Pejabat Fungsional Golongan II | 435.000 |
| 5 | Pelaksana Golongan IV | 480.000 |
| 6 | Pelaksana Golongan III | 400.000 |
| 7 | Pelaksana Golongan II | 370.000 |

- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, dan Kecamatan Kampiang diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--|----------------------|
| 1 | Dokter Umum/Dokter Gigi : | |
| | - Pejabat Fungsional Golongan IV | 2.500.000 |
| | - Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS | 2.000.000 |
| 2 | Pejabat Fungsional Golongan IV | 570.000 |
| 3 | Pejabat Fungsional Golongan III | 500.000 |
| 4 | Pejabat Fungsional Golongan II | 450.000 |
| 5 | Pelaksana Golongan IV | 500.000 |
| 6 | Pelaksana Golongan III | 440.000 |
| 7 | Pelaksana Golongan II | 400.000 |
| 8 | Pelaksana Golongan I | 380.000 |

- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Marikit, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Sanaman Mantikei diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--|----------------------|
| 1 | Dokter Umum/Dokter Gigi : | |
| | - Pejabat Fungsional Golongan IV | 4.500.000 |
| | - Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS | 4.000.000 |
| 2 | Pejabat Fungsional Golongan IV | 1.000.000 |
| 3 | Pejabat Fungsional Golongan III | 850.000 |
| 4 | Pejabat Fungsional Golongan II | 750.000 |
| 5 | Pelaksana Golongan IV | 1.000.000 |
| 6 | Pelaksana Golongan III | 850.000 |
| 7 | Pelaksana Golongan II | 750.000 |
| 8 | Pelaksana Golongan I | 650.000 |

- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis di wilayah Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--|----------------------|
| 1 | Dokter Umum/Dokter Gigi : | |
| | - Pejabat Fungsional Golongan IV | 4.500.000 |
| | - Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS | 4.000.000 |
| 2 | Pejabat Fungsional Golongan IV | 1.050.000 |
| 3 | Pejabat Fungsional Golongan III | 900.000 |
| 4 | Pejabat Fungsional Golongan II | 800.000 |
| 5 | Pelaksana Golongan IV | 1.050.000 |
| 6 | Pelaksana Golongan III | 900.000 |
| 7 | Pelaksana Golongan II | 800.000 |
| 8 | Pelaksana Golongan I | 680.000 |

- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kec.Katingan Hilir diatur sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Jabatan Fungsional Golongan IV | 350.000 |
| 2 | Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS | 300.000 |
| 3 | Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS | 250.000 |
| 4 | Pelaksana Golongan I | 230.000 |

- h. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Tasik Payawan diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Jabatan Fungsional Golongan IV | 425.000 |
| 2 | Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS | 350.000 |
| 3 | Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS | 325.000 |
| 4 | Pelaksana Golongan I | 300.000 |

- i. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Kamipang

diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Jabatan Fungsional Golongan IV | 460.000 |
| 2 | Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS | 400.000 |
| 3 | Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS | 350.000 |
| 4 | Pelaksana Golongan I | 325.000 |

- j. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Marikit, Kecamatan Katingan Hulu, Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Jabatan Fungsional Golongan IV | 587.500 |
| 2 | Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS | 480.000 |
| 3 | Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS | 450.000 |
| 4 | Pelaksana Golongan I | 425.000 |

- k. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai diatur sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

| No | Uraian | Tambahan Penghasilan |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Jabatan Fungsional Golongan IV | 600.000 |
| 2 | Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS | 490.000 |
| 3 | Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS | 455.000 |
| 4 | Pelaksana Golongan I | 435.000 |

- B. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.1. Belanja Tidak Langsung angka 1) Belanja Pegawai huruf (d) angka 5 dan 6 diubah serta penambahan poin 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Mengingat beban Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Tenaga Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan melebihi beban kerja normal, selain memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada point 5.4.1.1 huruf c) angka (2a) juga diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dengan ketentuan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 5.4.1.14
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

| No | Uraian | HARI KERJA | | HARI LIBUR | | |
|----|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Jaga Sore (per 6 jam) | Jaga Malam (per 11 jam) | Jaga Pagi (per 8 jam) | Jaga Sore (per 6 jam) | Jaga Malam (per 11 jam) |
| 1 | Dokter Spesialis | Rp. 40.000,00 | Rp. 50.000,00 | Rp. 50.000,00 | Rp. 40.000,00 | Rp. 50.000,00 |
| 2 | Dokter Umum/Gigi | Rp. 30.000,00 | Rp. 40.000,00 | Rp. 40.000,00 | Rp. 30.000,00 | Rp. 40.000,00 |
| 3 | Perawat/Bidan | Rp. 20.000,00 | Rp. 30.000,00 | Rp. 30.000,00 | Rp. 20.000,00 | Rp. 30.000,00 |

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan dengan profesi Dokter

Spesialis dan Akuntan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dokter Spesialis Rp. 17.500.000,00;
- Akuntan Rp. 5.000.000,00;

Untuk tenaga Akuntan dipersyaratkan :

- Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai akuntan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Memiliki Nomor Register Negara sebagai Akuntan;

C. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.2. Belanja Langsung angka 3 huruf (f) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

f. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan yang menjalankan tugas/fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Katingan tentang penunjukan personalia pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa diberikan Honorarium sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 5.4.2.3.a
Honorarium Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

| NO | URAIAN | SATUAN | HONORARIUM |
|----|--|-----------|--------------|
| 1 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | OB | Rp 365.000 |
| 2 | Panitia Pengadaan Barang (Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta | Per Paket | Rp 365.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OP | Rp 550.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OP | Rp 700.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | Rp 850.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar .sd. Rp2,5 miliar | OP | Rp 1.050.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OP | Rp 1.200.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | Rp 1.350.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OP | Rp 1.700.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OP | Rp 1.900.000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OP | Rp 2.000.000 |
| | k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | Rp 2.200.000 |
| | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP | Rp 2.650.000 |
| | m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | Rp 3.100.000 |
| | n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | Rp 3.500.000 |
| | o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | Rp 3.750.000 |
| | p. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun | OP | Rp 4.000.000 |
| 3 | Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta | Per Paket | Rp 365.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OP | Rp 500.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OP | Rp 600.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | Rp 750.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar .sd. Rp2,5 miliar | OP | Rp 900.000 |

| | | | |
|---|---|-----------|--------------|
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OP | Rp 1.050.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | Rp 1.150.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OP | Rp 1.450.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OP | Rp 1.600.000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OP | Rp 1.750.000 |
| | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | Rp 1.900.000 |
| | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP | Rp 2.300.000 |
| | m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | Rp 2.700.000 |
| | n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | Rp 3.000.000 |
| | o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | Rp 3.200.000 |
| | p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun | OP | Rp 3.400.000 |
| 4 | Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 juta | Per Paket | Rp 365.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta | OP | Rp 365.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta | Per Paket | Rp 365.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OP | Rp 400.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OP | Rp 500.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | Rp 600.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OP | Rp 750.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OP | Rp 900.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | Rp 1.000.000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OP | Rp 1.200.000 |
| | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OP | Rp 1.350.000 |
| | l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OP | Rp 1.450.000 |
| | m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | Rp 1.550.000 |
| | n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP | Rp 1.900.000 |
| | o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | Rp 2.200.000 |
| | p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | Rp 2.500.000 |
| | q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | Rp 2.700.000 |
| | r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun | OP | Rp 2.850.000 |
| 5 | Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa | OB | Rp 260.000 |
| 6 | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa | | |
| | a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp100 juta | OP | Rp 250.000 |
| | b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OP | Rp 300.000 |
| | c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OP | Rp 450.000 |
| | d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | Rp 500.000 |
| | e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OP | Rp 600.000 |
| | f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OP | Rp 700.000 |

| | | | |
|----|---|----|--------------|
| g. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | Rp 800.000 |
| h. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OP | Rp 1.000.000 |
| i. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OP | Rp 1.100.000 |
| j. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OP | Rp 1.200.000 |
| k. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | Rp 1.300.000 |
| l. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP | Rp 1.600.000 |
| m. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | Rp 1.900.000 |
| n. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | Rp 2.100.000 |
| o. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | Rp 2.250.000 |
| p. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun | OP | Rp 2.400.000 |

* Keterangan : OB = Orang/bulan
OP = Orang/Paket

D. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.2. Belanja Langsung angka 3 huruf l) poin 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Tenaga kontrak Bidang Medis dan Tenaga Sukarela Kesehatan sebagaimana dimaksud point 5.4.2.3 huruf l) angka (3) diberikan Upah yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana Tabel-Tabel berikut :

Penghasilan Tenaga Ahli Bidang Medis di RSUD

| No | Uraian | Penghasilan/Bulan |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Dokter Spesialis PTT/Tenaga Kontrak | Rp. 17.500.000,00 |
| 2 | Dokter Residen Spesialis | Rp. 15.000.000,00 |
| 3 | Dokter Umum/Gigi PTT | Rp. 2.500.000,00 |

Penghasilan Tenaga Ahli Bidang Medis di PUSKESMAS

| No | Uraian | Penghasilan/Bulan |
|----|--|-------------------|
| 1 | Dokter Umum/Gigi PTT Yang Berkedudukan diwilayah: 1. Kecamatan Katingan Hilir, 2. Kecamatan Tewang Sangalang garing, 3. Kecamatan Tasik Payawan, 4. Kecamatan Pulau Malan, 5. Kecamatan Katingan Tengah, dan 6. Kecamatan kamipang. | Rp. 2.000.000 |
| 2 | Dokter Umum/Gigi PTT Yang Berkedudukan diwilayah: 1. Kecamatan Marikit, 2. Kecamatan Mendawai, 3. Kecamatan Katingan Hulu, 4. Kecamatan katingan Kuala, 5. Kecamatan Sanaman Mantikei, 6. Kecamatan Bukit Raya, dan 7. Kecamatan Petak Malai. | Rp. 3.000.000 |

E. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.2. Belanja Langsung angka 3 huruf (l) ditambahkan angka 17 dan 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 17) Kepada masing-masing Pejabat Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan diberikan Honorarium per-bulan melalui Sekretariat Daerah yang diatur sebagai berikut :

Honorarium Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
(per-bulan)

| No | Uraian | Nilai Aset Yang Dikelola | | | | |
|----|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | 0 s/d 2,5 Milyard | 2,5 Milyard s/d 5 Milyard | 5 Milyard s/d 10 Milyard | 10 Milyard s/d 25 Milyard | 25 Milyard dst |
| 1 | Pengurus Barang | 240.000 /bulan | 260.000 /bulan | 280.000/bulan | 300.000 /bulan | 320.000 /bulan |
| 2 | Penyimpan Bararg | 220.000 /bulan | 240.000 /bulan | 260.000 /bulan | 280.000 /bulan | 300.000 /bulan |

- 18) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf *l*) angka (17) Pejabat Pengurus Barang dan Penyimpan Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

F. Ketentuan Lampiran 1 Angka 6 Hal-hal Khusus Lainnya Poin 12 dan 17 diubah dan menambah poin 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Untuk Tahun Anggaran 2012, beberapa belanja yang terpusat di Sekretariat Daerah antara lain:

a. Belanja Alat Tulis Kantor

Seluruh belanja Alat Tulis Kantor di pusatkan di Sekretariat Daerah, Kecuali:

1. Biaya ATK untuk Operasional Kelurahan yang dananya melekat di Kecamatan;
2. Biaya ATK untuk UPTD;

b. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Desktop;

Seluruh Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Desktop harus melekat di Sekretariat Daerah kecuali apabila pada pengadaan Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Desktop tersebut melekat suatu Aplikasi Khusus untuk mendukung suatu program kegiatan di SKPD.

c. Belanja Modal Pengadaan Komputer/ Note Book;

Seluruh Belanja Modal Pengadaan Komputer/ Note Book harus melekat di Sekretariat Daerah kecuali apabila pada pengadaan Belanja Modal Pengadaan Komputer/ Note Book tersebut melekat suatu Aplikasi Khusus untuk mendukung suatu program kegiatan di SKPD.

- d. Untuk poin a, b, dan c, apabila dana tersebut bukan berasal dari dana APBD dan ada peraturan yang mengharuskan belanja tersebut melekat di SKPD yang bersangkutan, maka SKPD yang bersangkutan diperkenankan untuk menganggarkan belanja tersebut dengan mendapat persetujuan dari Bupati Katingan.

17. Untuk Tahun Anggaran 2012 selain Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang mengadakan Mobil Kebakaran, Pengadaan Kendaraan Dinas/ Kendaraan Jabatan/ kendaraan Operasional/Ambulance

hanya boleh dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Dalam hal SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan membutuhkan penambahan Kendaraan Dinas/Kendaraan Jabatan/Kendaraan Operasional, SKPD dimaksud harus mengajukan permohonan kepada Bupati Katingan untuk kemudian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Kecuali dana tersebut bukan berasal dari APBD dan ada peraturan yang mengharuskan belanja tersebut melekat di SKPD yang bersangkutan, maka SKPD yang bersangkutan diperkenankan untuk menganggarkan belanja tersebut;

18. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang tidak diubah dan dicabut dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tetap berlaku.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 26 Juni 2012

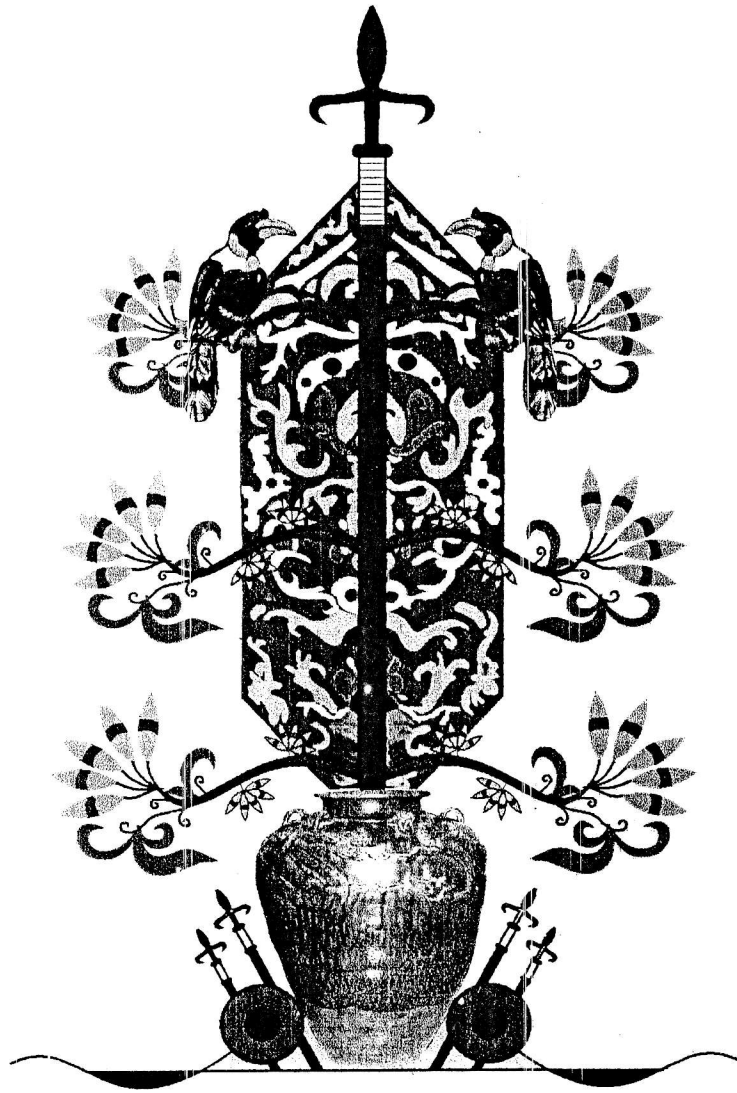


Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 26 Juni 2012



Ir. CHRISTANTWO TATEL LADJU, MM
PEMBAINA UTAMA MADYA
NIP. 19610203 198603 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 69



PROGRAM DAN KEGIATAN

**Penambahan Program Dan Kegiatan Baru Tahun Anggaran 2011
KABUPATEN KATINGAN**

| KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN |
|----------------------|--|
| | Program / Kegiatan Yang Dapat Dipergunakan oleh Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| 0.00.00.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| 0.00.00.06.09 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten |
| | PROGRAM MENURUT URUSAN |
| 1 | Urusan Wajib |
| 1.02 | Kesehatan |
| 1.02.00.30 | Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat |
| 1.02.00.30.07 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Pagatan 1 |
| 1.02.00.30.08 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Pagatan 2 |
| 1.02.00.30.09 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Mendawai |
| 1.02.00.30.10 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Baun Bango |
| 1.02.00.30.11 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Petak Bahandang |
| 1.02.00.30.12 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Kasongan |
| 1.02.00.30.13 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Kereng Pangi |
| 1.02.00.30.14 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Pendahara |
| 1.02.00.30.15 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Buntut Bali |
| 1.02.00.30.16 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Tumbang Samba |
| 1.02.00.30.17 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Tumbang Kaman |
| 1.02.00.30.18 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Tumbang Baraci |
| 1.02.00.30.19 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Tumbang Hiran |
| 1.02.00.30.20 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Tumbang Sanamang |
| 1.02.00.30.21 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Tumbang Kajamei |
| 1.02.00.30.22 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pembantu dan Polindes di Puskesmas Kasongan II |
| 1.06 | Perencanaan Pembangunan |
| 1.06.00.15 | Program Pengembangan Data/Informasi |
| 1.06.00.15.10 | Pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Katingan |
| 1.06.00.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1.06.00.21.31 | Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Pedoman Umum APBD |
| 1.06.00.22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi |
| 1.06.00.22.14 | Pembangunan Percontohan Sarana Air Minum |
| 1.06.00.22.15 | Penyusunan Master Plan Agropolitan |
| 1.06.00.23 | Program Perencanaan Sosial Dan Budaya |
| 1.06.00.23.11 | Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah |

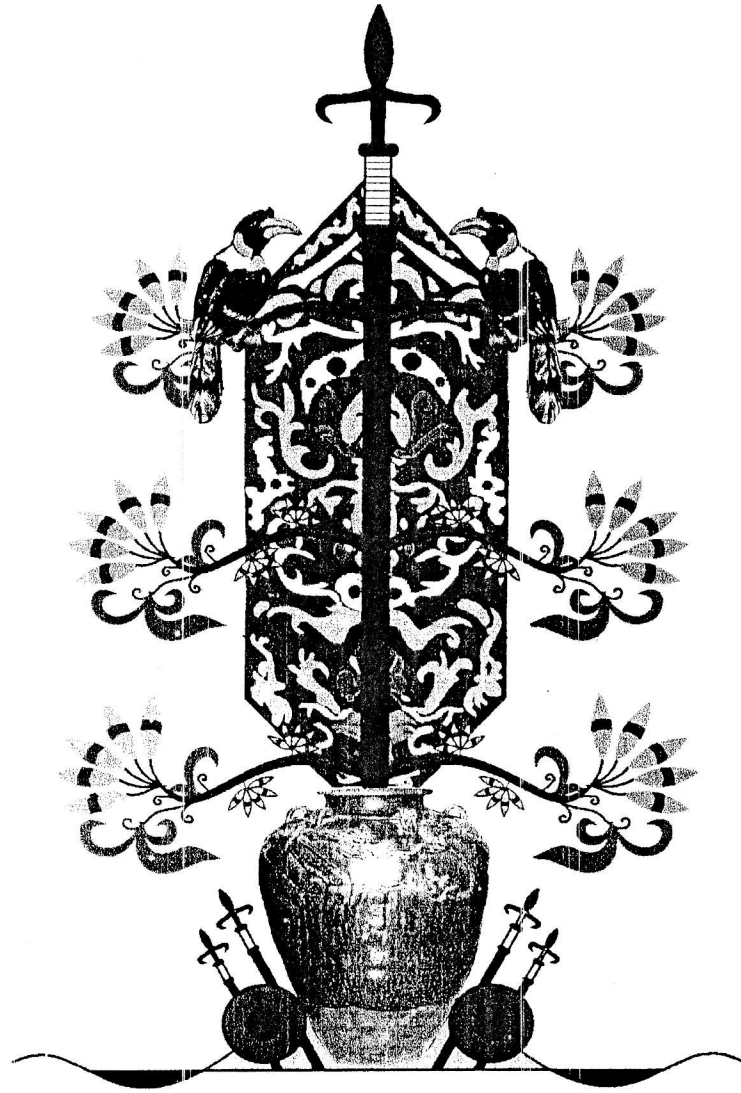
| | |
|-------------------|---|
| 1.06.00.23.12 | Kajian Kesehatan Reproduksi (Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu hamil) |
| 1.06.00.31 | Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi |
| 1.06.00.31.15 | Mengikuti Expo Potensi Pembangunan Kabupaten Katingan |
| 1.06.00.31.15.a | Pembuatan Features, Data Sarana dan Prasarana Penunjang Investasi Dalam 2 Bahasa |
| 1.06.00.31.15.b | Mengikuti Pameran Kalteng Expo |
| 1.06.00.31.15.c | Mengikuti Pameran Borneo Investment Expo dan Forum |
| 1.06.00.31.15.d | Mengikuti Pameran Investasi dan Budaya |
| 1.06.00.32 | Program Difusi Pemanfaatan IPTEK |
| 1.06.00.32.02 | Kajian Penerapan Teknologi Sistem Pembangunan Berbasis GIS |
| 1.07 | Perhubungan |
| | Revisi Nama dan Kode Kegiatan |
| 1.07.00.16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan |
| | Kegiatan yang dihapus |
| 1.07.00.25 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |
| 1.07.00.25.01 | Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran Dan KMIP |
| 1.07.00.25.02 | Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi |
| 1.07.00.25.03 | Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi |
| 1.07.00.25.04 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi |
| 1.07.00.25.05 | Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi |
| 1.07.00.25.06 | Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi |
| 1.07.00.25.07 | Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi |
| 1.07.00.25.08 | Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat |
| 1.07.00.26 | Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi |
| 1.07.00.26.01 | Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi |
| 1.07.00.27 | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi |
| 1.07.00.27.01 | Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi |
| 1.07.00.28 | Program kerjasama informasi dan media massa |
| 1.07.00.28.01 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah |
| 1.07.00.28.02 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 1.07.00.28.03 | Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat |
| | Tambahan Program dan Kegiatan |
| 1.07.00.18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan |
| 1.07.00.18.16 | Pemeliharaan dan Pembersihan Tanah Lokasi Terminal/Pelabuhan/Dermaga/Pos Pengawasan |
| 1.07.00.21 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |
| 1.07.00.21.08 | Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat |
| 1.07.00.21.09 | Pengadaan Saran Usaha Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) |
| 1.07.00.21.10 | Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Website |
| 1.07.00.21.11 | Updating Data Website |
| 1.07.00.21.12 | Penyusunan Blueprint Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 1.07.00.22 | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi |
| 1.07.00.22.02 | Pengkajian dan Penelitian Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan |
| 1.07.00.22.03 | Pengkajian dan Penelitian Tentang Aplikasi Teknologi Komunikasi dan Informasi di Bidang e-gov |
| 1.07.00.23 | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi |
| 1.07.00.23.02 | Pengadaan Workshop Bidang Teknologi Informasi |
| 1.07.00.23.03 | Pelatihan Teknologi Informasi pada Masyarakat Umum/Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) |

| | |
|-------------------|--|
| 1.07.00.23.04 | Pengadaan Lomba Karya Ilmiah / Cipta Teknologi Informasi |
| 1.07.00.24 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa |
| 1.07.00.24.04 | Fasilitas Pentas Seni / Temu Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kecamatan |
| 1.07.00.24.05 | Apresiasi Pertunjukan Rakyat/Kelompok Media Tradisional |
| 1.07.00.25 | Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi |
| 1.07.00.25.01 | Pembuatan Jaringan Komputer / Internet |
| 1.07.00.25.02 | Pembuatan Sistem Informasi / Software dan Konten untuk Integrasi Teknologi Informasi |
| 1.07.00.25.03 | Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi |
| 1.07.00.25.04 | Pemeliharaan Jaringan Bidang Komunikasi |
| 1.07.00.25.05 | Pemeliharaan Sistem Informasi / Software |
| 1.07.00.25.06 | Pengawasan dan Penertiban Bidang Teknologi Informasi |
| 1.07.00.25.07 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Komunikasi Informasi |
| 1.07.00.25.08 | Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat |
| 1.07.00.25.09 | Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) |
| 1.07.00.25.10 | Penyusunan dan Diseminasi Informasi / Paket-paket Informasi Publik |
| 1.07.00.25.11 | Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat |
| 1.07.00.25.12 | Fasilitas Rekomendasi dan Perijinan Bidang Komunikasi Informasi |
| 1.07.00.25.13 | Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pemilik Jasa Bidang Komunikasi / Teknologi Informasi Teladan |
| 1.07.00.25.14 | Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi |
| 1.07.00.25.15 | Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Komunikasi Informasi |
| 1.07.00.25.16 | Pemeliharaan/ Pembersihan Tanah Lokasi Fasilitas Komunikasi Informasi |
| 1.07.00.25.17 | Peningkatan Pelayanan Telecenter |
| 1.07.00.25.18 | Pengumpulan Data Center Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 1.07.00.25.19 | Fasilitasi Akses Internet Kecamatan dan Pedesaan. |
| | |
| 1.11 | Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak |
| 1.11.00.30 | Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU |
| 1.11.00.30.02 | Sosialisasi Dan Pelatihan Kader BKB, BKR, BKL, Dan BLK |
| 1.11.00.31 | Program Pengembangan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga |
| 1.11.00.31.01 | Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Nasional |
| | |
| 1.20 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian |
| 1.20.00.29 | Program Peningkatan Administrasi Pertanahan |
| 1.20.00.29.06 | Pembangunan Sarana Drainase Kebun Raya |
| 1.20.00.29.07 | Pembuatan dan Pemasangan Nama Jalan dan Gang |
| 1.20.00.31 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan |
| 1.20.00.31.09 | Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama |
| 1.20.00.31.10 | Penataan Unit Pelaksana Tugas Daerah |
| 1.20.00.33 | Program Administrasi Kerjasama Pembangunan |
| 1.20.00.33.07 | Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) |
| 1.20.00.33.08 | Pelatihan Bagi Pengguna LPSE Kabupaten Katingan |
| 1.20.00.33.09 | Sarana Prasarana Penunjang LPSE Kabupaten Katingan |
| 1.20.00.42 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 1.20.00.42.31 | Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 1.20.00.42.32 | Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Telah Jatuh Tempo, Penyelesaian Permohonan Banding dan Keberatan Wajib Pajak |
| 1.20.00.42.33 | Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah |
| 1.20.00.42.34 | Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang Daerah |
| 1.20.00.42.35 | Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah |
| 1.20.00.61 | Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran |
| 1.20.00.61.01 | Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 1.20.00.61.02 | Penyusunan Laporan SPD |
| 1.20.00.61.03 | Penyusunan Laporan KASDA |
| 1.20.00.61.04 | Penyusunan Laporan SP2D |

| | |
|-------------------|--|
| 1.20.00.61.05 | Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan Pajak Dan Retribusi Daerah |
| 1.20.00.62 | Sosialisasi PBB dan BPHTB |
| 1.20.00.62.01 | Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan Pajak Dan Retribusi Daerah |
| 1.20.00.62.02 | Sosialisasi PBB dan BPHTB |
| 1.20.00.63 | Program Peningkatan Data Obyek Pajak |
| 1.20.00.63.01 | Pemutakhiran Data dan Pengembangan Data Pajak dan Retribusi Daerah |
| 1.20.00.63.02 | Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 1.20.00.63.03 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pajak |
| 1.20.00.64 | Program Pengembangan Pajak Daerah |
| 1.20.00.64.01 | Kegiatan Penelitian Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah |
| 1.20.00.64.02 | Kegiatan Pelatihan di Bidang Perpajakan dan Peraturan-peraturan Baru |
| 1.20.00.65 | Program Peningkatan Penerimaan Pajak |
| 1.20.00.65.01 | Pekan Panutan PBB |
| 1.20.00.65.02 | Pembinaan Terhadap Wajib Pajak Restaurant/Warung Makan dan Hotel |
| 1.20.00.66 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi |
| 1.20.00.66.01 | Penyebaran Model - model Pola Pengembangan Koperasi |
| | |
| 1.21 | Ketahanan Pangan |
| 1.21.00.16 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan |
| 1.21.00.16.12 | Bantuan Sosial Lumbung Pangan Desa (Bansos) |
| 1.21.00.18 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan |
| 1.21.00.18.11 | Kegiatan Pembinaan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
| 1.21.00.18.12 | Pengembangan Teknologi Pertanian |
| | |
| 2 | Urusan Pilihan |
| | |
| 2.01 | Pertanian |
| 2.01.00.15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani |
| 2.01.00.15.09 | Fasilitasi Kelembagaan (UPTD Pertanian) dan Pendampingan Bagi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan |
| 2.01.00.16 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan |
| 2.01.00.16.43 | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian |
| 2.01.00.16.44 | Pengembangan Ekstensifikasi Tanaman Padi, Palawija |
| 2.01.00.19 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan |
| 2.01.00.19.07.a | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Katingan Kuala |
| 2.01.00.19.07.b | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Mendawai |
| 2.01.00.19.07.c | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Kamipang |
| 2.01.00.19.07.d | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Tasik Payawan |
| 2.01.00.19.07.e | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Katingan Hilir |
| 2.01.00.19.07.f | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Tewang Sanggalang Garing |
| 2.01.00.19.07.g | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Pulau Malan |
| 2.01.00.19.07.h | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Katingan Tengah |
| 2.01.00.19.07.i | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Sanaman Mantikei |
| 2.01.00.19.07.j | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Marikit |
| 2.01.00.19.07.k | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Katingan Hulu |
| 2.01.00.19.07.l | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Bukit Raya |
| 2.01.00.19.07.m | Fasilitasi UPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan Kecamatan Petak Malai |

| | |
|-------------------|---|
| 2.02 | Kehutanan |
| 2.02.00.15 | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan |
| 2.02.00.15.22 | Peningkatan Pelayanan Tugas WAS-GANISPHPL-PKB di IUPHHK dan IPHHK |
| 2.02.00.15.23 | Pendataan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Untuk Menerapkan Pola Pembangunan HTR |
| 2.02.00.15.24 | Pendataan dan Fasilitasi Pola Pemberdayaan HHBK Rotan Melalui Pendampingan Proses Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan HHBK |
| 2.02.00.15.25 | Fasilitasi Perijinan IUIPHH/IPKH dan Industri Lanjutan Kayu dan Bukan Kayu/Rotan |
| 2.02.00.15.26 | Pendataan Persediaan/Stock Opname Hasil Hutan dari Kegiatan Perijinan Kehutanan |
| 2.02.00.15.27 | Pendataan dan Fasilitasi Serta Monitoring dan Evaluasi Perijinan Usaha Industri Primer dan Lanjutan Kayu dan Bukan Kayu (Rotan) |
| 2.02.00.16 | Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan |
| 2.02.00.16.12a | Reboisasi Hutan Sumber Dana DBH-DR 2004 (Lanjutan) |
| 2.02.00.16.15a | Reboisasi Hutan Sumber Dana DBH-DR 2007 (Lanjutan) |
| 2.02.00.20 | Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan |
| 2.02.00.20.10 | Kajian Perubahan Fungsi Kawasan |
| 2.05 | Kelautan Dan Perikanan |
| 2.05.00.20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan |
| 2.05.00.20.33 | Operasional BBI Hampalit |
| 2.05.00.20.34 | Pembangunan, Pembukaan, Pengembangan Lahan Tambak |
| 2.05.00.20.35 | Operasional Tambak |
| 2.05.00.20.36 | Pemeliharaan Rutin / Berkala / Rehab Karamba Percontohan |
| 2.05.00.20.37 | Penambahan Sarana Prasarana Karamba Percontohan |
| 2.05.00.20.38 | Operasional Karamba Percontohan |
| 2.05.00.23 | Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan |
| 2.05.00.23.13 | Pemeliharaan Rutin / Berkala / Rehab Pasar Benih |
| 2.05.00.23.14 | Penambahan Sarana Prasarana Pasar Benih |
| 2.05.00.23.15 | Operasional Pasar Benih |
| 2.05.00.23.16 | Penambahan Sarana Prasarana Gedung Raiser |
| 2.05.00.23.17 | Operasional Gedung Raiser |
| 2.05.00.25 | Program Kualitas Perencanaan Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan |
| 2.05.00.25.11 | Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya |
| 2.05.00.25.12 | Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap |
| 2.05.00.25.13 | Validasi Data Statistik Pengolahan Hasil Perikanan |
| 2.05.00.25.14 | Validasi Data Statistik Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) |
| 2.05.00.26 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Laut Dan Perairan Umum |
| 2.05.00.26.09 | Penunjangan Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L) |
| 2.05.00.27 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan |
| 2.05.00.27.01 | Rehabilitasi Kawasan Perikanan Perairan Umum |
| 2.05.00.27.02 | Pembinaan Kawasan Konservasi Sumberdaya Ikan dan Kelautan |
| 2.05.00.27.03 | Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan |
| 2.05.00.27.04 | Rehabilitasi Kawasan Perikanan Perairan Pesisir dan Laut |
| 2.05.00.27.05 | Identifikasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sumberdaya Ikan |
| 2.05.00.27.06 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Kawasan Konservasi Sumberdaya Ikan dan Kelautan |





KODE REKENING

**Penambahan Kode Rekening Baru Tahun Anggaran 2012
KABUPATEN KATINGAN**

| KODE REKENING | Nama Rekening |
|----------------------|--|
| 1 | Aset |
| 1.3 | Aset Tetap |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin |
| 1.3.2.21 | Alat-alat Persenjataan/Keamanan |
| 1.3.2.21.18 | Alat-alat Pemadam Kebakaran |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan |
| 1.3.3.12 | Bangunan Sarana Daerah Lainnya |
| 1.3.3.12.04 | Sarana Prasarana Olahraga |
| 1.3.3.12.05 | Sarana Prasarana Pariwisata |
| 4 | Pendapatan Daerah |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha |
| 4.1.2.02.15 | Iuran Tetap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan |
| 4.1.2.02.16 | Penelusuran Informasi dan Penetapan |
| 4.1.2.02.17 | Retribusi Pengolahan dan Pemurnian Mineral |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu |
| 4.1.2.03.13 | Pencadangan Wilayah |
| 4.1.2.03.14 | Pengganti Iuran Produksi |
| 5 | BELANJA DAERAH |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai |
| 5.1.1.04 | Biaya Pemungutan Pajak |
| 5.1.1.04.02 | Biaya Pemungutan PAD |
| 5.1.1.07 | Belanja Penghasilan Lainnya |
| 5.1.1.07.01 | Tambahan Penghasilan Bagi Guru Non Sertifikasi |
| 5.1.1.07.02 | Tambahan Penghasilan Bagi Guru Bersertifikasi |
| 5.1.4 | Belanja Hibah |
| 5.1.4.08 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah |
| 5.1.4.08.01 | Belanja Hibah Kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota |
| 5.1.4.08.02 | Belanja Hibah Kepada Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS |
| 5.2.1.01.08 | Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis |
| 5.2.2.01.22 | Belanja Cenderamata / Souvenir |
| 5.2.2.01.23 | Belanja Seminar KIT |
| 5.2.2.02 | Belanja Bahan Material |
| 5.2.2.02.10 | Belanja Bahan Baku Mentah |
| 5.2.2.02.11 | Belanja Bahan Alat-alat Kesehatan Hewan |
| 5.2.2.02.12 | Belanja Bahan Alat-alat Pertanian |
| 5.2.2.02.13 | Belanja Pembibitan Pertanian |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor |
| 5.2.2.03.19 | Belanja Jasa Penyusunan / Perijinan Hak Paten |
| 5.2.2.03.20 | Belanja Penunjang Operasional Sekolah |
| 5.2.2.03.21 | Belanja Biaya Operasional dan Pelaksanaan Program Puskesmas/Pustu/Polindes/Poltekkes |
| 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |
| 5.2.2.10.10 | Belanja Sewa Perlengkapan Masak |

| | |
|-----------------|--|
| 5.2.2.16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS |
| 5.2.2.16.03 | Belanja beasiswa tugas belajar S2 |
| 5.2.2.16.04 | Belanja beasiswa tugas belajar S3 |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan |
| 5.2.2.20.25 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pariwisata dan Cagar Budaya |
| 5.2.2.20.26 | Belanja Pemeliharaan Gerbang Batas Antar Daerah |
| 5.2.2.20.27 | Pemeliharaan Daerah Resapan Air |
| 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi |
| 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Konsultansi Pajak |
| 5.2.2.21.05 | Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan |
| 5.2.2.21.06 | Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan LAKIP |
| 5.2.2.21.07 | Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) |
| 5.2.2.25 | Biaya Uji Laboratorium |
| 5.2.2.25.01 | Biaya Uji Laboratorium |
| 5.2.2.26 | Belanja Beasiswa Pendidikan |
| 5.2.2.26.01 | Belanja Beasiswa Pendidikan TK, SD, SMP, SMA / Sederajat |
| 5.2.2.26.02 | Belanja Beasiswa Pendidikan Penyetaraan |
| 5.2.3 | Belanja Modal |
| 5.2.3.01 | Belanja Modal Pengadaan Tanah |
| 5.2.3.01.31 | Belanja Modal Pengurangan /Penimbunan/Pematangan Tanah |
| 5.2.3.01.32 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Bundaran |
| 5.2.3.11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor |
| 5.2.3.11.26 | Belanja Modal Pengadaan Sumur Pompa/Bor |
| 5.2.3.18 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur |
| 5.2.3.18.13 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur dan Alat Uji Kehutanan |
| 5.2.3.23 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air |
| 5.2.3.23.09 | Pembuatan Sarana Drainase Kantor |
| 5.2.3.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan |
| 5.2.3.26.15 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron |
| 5.2.3.26.16 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Ibadah |
| 5.2.3.26.17 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Asrama |
| 5.2.3.26.18 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Pariwisata |
| 5.2.3.30 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan |
| 5.2.3.30.18 | Belanja Peralatan Pemadam Kebakaran |
| 5.2.3.32 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga |
| 5.2.3.32.20 | Belanja Modal Papan Score |
| 6 | Pembiayaan Daerah |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya |
| 6.1.1.07 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |
| 6.1.1.07.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |

Revisi Kode rekening

| | |
|-----------------|---|
| 5.2.3 | Belanja Modal |
| 5.2.3.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan |
| | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan/Gerbang Batas/Gapura |
| 5.2.3.26.07 | |

